

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah *Wealth*, *Intergovernmental Revenue*, *Leverage* dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan subjek penelitian pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2014-2018. Data yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id).

3.1.1 Sejarah berdirinya provinsi Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara banyak tersebar di Jawa Barat. Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi (yang digunakan dalam masa Palawa India) dan bahasa Sansakerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara.

Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari tahun 932. Kerajaan Sunda beribu kota di Pakuan Pajajaran (sekarang kota Bogor).

Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cerbon (kelak menjadi Kota Cirebon)

lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten.

Untuk menghadapi ancaman ini, Sri Baduga Maharaja, raja Sunda saat itu, meminta putranya, Surawisesa untuk membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan orang Portugis di Malaka untuk mencegah jatuhnya pelabuhan utama, yaitu Sunda Kalapa (sekarang Jakarta) kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Pada saat Surawisesa menjadi raja Sunda, dengan gelar Prabu Surawisesa Jayaperkosa, dibuatlah perjanjian pertahanan keamanan Sunda-Portugis, yang ditandai dengan Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal, ditandatangani dalam tahun 1512. Sebagai imbalannya, Portugis diberi akses untuk membangun benteng dan gudang di Sunda Kalapa serta akses untuk perdagangan di sana. Untuk merealisasikan perjanjian pertahanan keamanan tersebut, pada tahun 1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut *padrão* di tepi Ci Liwung.

Meskipun perjanjian pertahanan keamanan dengan Portugis telah dibuat, pelaksanaannya tidak dapat terwujud karena pada tahun 1527 pasukan aliansi Cirebon - Demak, dibawah pimpinan Fatahilah atau Paletihan menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kalapa. Perang antara Kerajaan Sunda dan aliansi Cirebon - Demak berlangsung lima tahun sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon.

Dari tahun 1567 sampai 1579, dibawah pimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar dibawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran (ibu kota Kerajaan Sunda), dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah Priangan (Jawa Barat bagian tenggara) jatuh ke tangan Kesultanan Mataram.

Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan *Bestuurs hervormingwet* tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah *Soendalanden* (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.

Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI) sebagai perwakilan PBB. Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950. (id.wikipedia.org).

3.1.2 Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 bahwa wilayah provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 Kabupaten dan 9 Kota hasil pemekaran sejak tahun 1996. Kabupaten dan Kota tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

No.	Pemerintah Daerah	No.	Pemerintah Daerah
1.	Kab. Bandung	15.	Kab. Sumedang
2.	Kab. Bekasi	16.	Kab. Tasikmalaya
3.	Kab. Bogor	17.	Kota Bandung
4.	Kab. Ciamis	18.	Kota Bekasi
5.	Kab. Cianjur	19.	Kota Bogor
6.	Kab. Cirebon	20.	Kota Cirebon
7.	Kab. Garut	21.	Kota Depok
8.	Kab. Indramayu	22.	Kota Sukabumi
9.	Kab. Karawang	23.	Kota Tasikmalaya
10.	Kab. Kuningan	24.	Kota Cimahi
11.	Kab. Majalengka	25.	Kota Banjar
12.	Kab. Purwakarta	26.	Kab. Bandung Barat
13.	Kab. Subang	27.	Kab. Pangandaran
14.	Kab. Sukabumi		

Sumber: www.djpk.kemekeu.go.id (diolah)

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 48.683.861 jiwa. Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pariwisata dengan budaya yang sangat kaya dan menjadi pusat kegiatan industri manufaktur dan strategis nasional serta memiliki taman nasional, suaka margasatwa dan cagar alam. Jawa Barat dikenal sebagai salah satu “lumbung padi” nasional, hampir 23% dari total luas wilayah dialokasikan untuk produksi beras. Selain itu, Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara.

3.1.3 Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi”

(Nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif)

b. Misi

- 1) Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara;
- 2) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara;
- 3) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara;
- 4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; dengan sasaran misi yaitu

nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta

5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian yang digunakan

Metode penelitian menurut Sugiyono (2017:2) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang telah lama digunakan untuk penelitian, sehingga seringkali disebut sebagai metode tradisional. Metode ini merupakan metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data dan penelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017:7).

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-

sebab dari suatu gejala tertentu. Menurut Sugiyono (2017:147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang umum atau generalisasi.

Berdasarkan tingkat kealamiah tempat penelitian, penelitian ini menggunakan metode survei, yakni penelitian dengan cara pengambilan sampel penelitian dari populasi yang ada dan kemudian menganalisis secara kritis terhadap subjek atas pertanyaan yang diajukan.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:38). Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis pada besarnya pengaruh yang ditimbulkan variabel independen terhadap variabel dependen.

Variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini sehubungan dengan judul yang diajukan, yaitu:

1. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel independennya yaitu:

a. *Wealth* (X_1)

Dalam penelitian ini *wealth* diproksikan dengan laju Pendapatan Asli Daerah (Tumpal Manik, 2013). Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. *Intergovernmental Revenue* (X_2)

Indikatornya adalah dana perimbangan dibandingkan dengan total penerimaan daerah (Gita Maiyora, 2015). Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Sedangkan Penerimaan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pembiayaan.

c. *Leverage* (X_3)

Indikatornya adalah *Debt to Equity Ratio* yaitu dengan membandingkan total utang dan ekuitas dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:39). Dalam penelitian ini yang dijadikan variabel dependen adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan indikatornya menggunakan rasio efisiensi yaitu dengan membandingkan realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah.

Untuk lebih jelasnya, operasionalisasi variabel penelitian dapat disajikan dalam tabel 3.2

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	2	3	4
<i>Wealth</i> (X ₁)	Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah. (Im Nur Aminah, Nunuy Nur Afiah, Arie Pratama, 2019:150)	$\Delta PAD = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$ (Tumpal Manik, 2013)	Rasio
<i>Intergovernmental Revenue</i> (X ₂)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU No. 33 Tahun 2004)	$\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$ (Gita Maiyora, 2015)	Rasio
<i>Leverage</i> (X ₃)	Tolak ukur yang akan digunakan oleh kreditor untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. (Mahmudi, 2016:111)	<i>Debt To Equity Ratio</i> $\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas Dana}}$ (Mahmudi, 2016:111)	Rasio
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah (PP No. 58 Tahun 2005)	Rasio Efisiensi $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusyufi, 2014:L-6)	Rasio

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

3.2.3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang berasal dari data sekunder. Data kuantitatif adalah informasi yang dinyatakan dalam satuan angka, menunjukkan nilai terhadap besaran variabel yang diwakilinya. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:137). Data sekunder didapatkan dengan mengadakan studi kepustakaan melalui mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Data dalam penelitian ini adalah Laporan APBD, Laporan realisasi APBD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>).

3.2.3.2 Populasi Sasaran

Menurut Sugiyono (2017:80) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi dapat terdiri dari objek dan benda-benda lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 18 Kabupaten dan 9 Kota. Populasi dalam hal ini dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Populasi Sasaran Penelitian

No.	Pemerintah Daerah	No.	Pemerintah Daerah
1.	Kab. Bandung	15.	Kab. Sumedang
2.	Kab. Bekasi	16.	Kab. Tasikmalaya
3.	Kab. Bogor	17.	Kota Bandung
4.	Kab. Ciamis	18.	Kota Bekasi
5.	Kab. Cianjur	19.	Kota Bogor
6.	Kab. Cirebon	20.	Kota Cirebon
7.	Kab. Garut	21.	Kota Depok
8.	Kab. Indramayu	22.	Kota Sukabumi
9.	Kab. Karawang	23.	Kota Tasikmalaya
10.	Kab. Kuningan	24.	Kota Cimahi
11.	Kab. Majalengka	25.	Kota Banjar
12.	Kab. Purwakarta	26.	Kab. Bandung Barat
13.	Kab. Subang	27.	Kab. Pangandaran
14.	Kab. Sukabumi		

Sumber: www.djpk.kemekeu.go.id (diolah)

3.2.3.3 Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu untuk dijadikan objek penelitian. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan metode pengambilan sampel *Nonprobability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2017:84). Dengan pendekatan *sampling purposive*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:85).

Pendekatan *sampling purposive* ini dilakukan dengan menggunakan pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti.

Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang secara konsisten melaporkan Laporan APBD, Laporan realisasi APBD, dan Neraca dari tahun 2014-2018 dan dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melalui website <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.
2. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang tidak mengalami pemekaran dan atau masih mempunyai kewajiban anggaran kepada daerah pemekaran selama periode 2014-2018. Kriteria ini dibuat untuk menghindari distorsi dikarenakan kabupaten induk masih mempunyai kewajiban untuk meghibahkan sejumlah APBD selama tiga tahun anggaran untuk mempersiapkan pembentukan dan keberlangsungan pemerintah daerah di kabupaten pemekaran.

Untuk penjelasan yang lebih lengkap mengenai jumlah populasi, sampel dan jumlah observasi yang diambil oleh peneliti, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Penentuan Sampel

Populasi	27 Kabupaten/Kota
Yang tidak memenuhi Kriteria	1 Kota dan 1 Kabupaten
Sampel	25 Kabupaten/Kota
Jumlah Tahun	5 Tahun (2014-2018)
Jumlah Observasi	125

3.2.3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang dikumpulkan dengan cara melihat, membaca dan mencatat data-data maupun informasi keuangan daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun anggaran 2014-2018 yang diperoleh dari www.djpk.kemenkeu.go.id.

2. Studi Kepustakaan (*library research*)

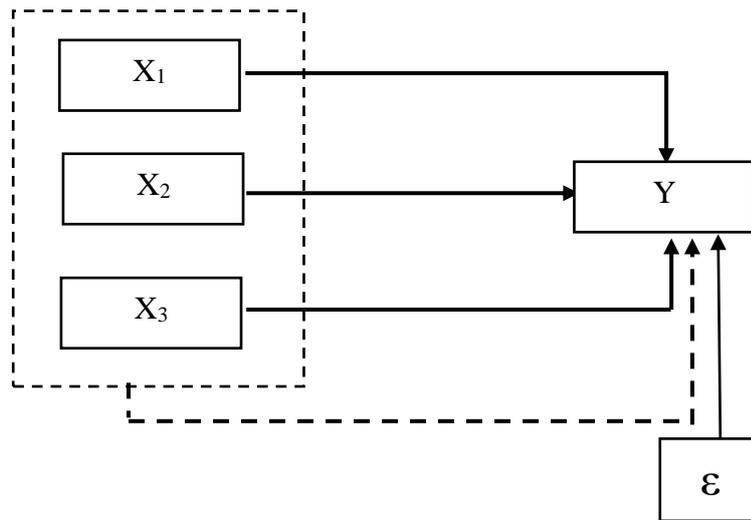
Dalam penelitian ini, penulis mengkaji teori yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, fasilitas internet serta karya tulis lainnya yang menunjang dan dianggap dapat memberikan masukan dalam penelitian ini.

3.3 Paradigma Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:42), bahwa:

“Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan.”

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Pengaruh *Wealth*, *Intergovernmental Revenue*, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, paradigma ini terdapat tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Paradigma penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1
Paradigma Penelitian

Keterangan:

$X_1 = Wealth$

$X_2 = Intergovernmental Revenue$

$X_3 = Leverage$

$Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah$

$\epsilon =$ Faktor-faktor lain yang tidak diteliti

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang akan di analisis dalam penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel, dimana 3 (tiga) variabel bebas yaitu *Wealth*, *Intergovernment Revenue* dan *Leverage* dan satu variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan model Analisis Regresi Data Panel. Analisis ini digunakan untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat (*dependent variable*) dengan satu atau lebih variabel bebas (*independent variable*). Perhitungan analisis data seluruhnya akan dibantu dengan menggunakan program *Eviews 10*.

Berdasarkan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel, maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X_1 : *Wealth*

X_2 : *Intergovernmental Revenue*

X_3 : *Leverage*

β_0 : Intersep atau Konstanta

$\beta_{1,2,3}$: Koefisien regresi

i : Kabupaten/Kota

t : Tahun

Menurut Setiawan dan Dwi Endah Kusri (2010:180) kelebihan data panel dibandingkan dengan data berkala dan data tampang lintang adalah sebagai berikut:

1. Data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, negara, provinsi, dan lain-lain selama beberapa waktu dengan batasan heterogenitas dalam setiap unitnya. Teknik estimasi data panel dapat mengambil heterogenitas tersebut

secara eksplisit ke dalam perhitungan dengan mengizinkan variabel-variabel individunya.

2. Dengan mengkombinasikan data berkala dan data tampak lintang, data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih variatif, kurang korelasi antarvariabelnya, lebih banyak derajat kebebasannya, dan lebih efisien.
3. Lebih sesuai untuk mempelajari perubahan secara dinamis.
4. Dapat mendeteksi dan mengukur efek suatu data yang tidak dapat diukur oleh data berkala dan tampak lintang.
5. Dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku, misalnya pembelajaran fenomena perubahan skala ekonomi dan teknologi dapat dilakukan dengan lebih baik oleh data panel daripada data berkala atau data tampak lintang.
6. Dengan membuat data untuk beberapa ribu unit, data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin terjadi apabila membahasnya dalam bentuk agregat.

3.4.1 Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Untuk mengetahui parameter model dengan data panel, terdapat 3 (tiga) teknik yang sering dilakukan, yaitu:

1) *Model Common Effect*

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan

waktu dan entitas (individu). Dimana pendekatan yang digunakan adalah dengan metode *Ordinary Least Square*. Dengan metode *Ordinary Least Square*, maka akan diasumsikan bahwa intercept maupun slope (koefisien pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat) tidak berubah baik antar individu maupun antar waktu. Doni Silalahi, Rachmad Sitepu dan Gim Tarigan (2014) menjelaskan metode ini mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk pool, mengestimasi dengan menggunakan pendekatan kuadrat terkecil (*pooled least square*).

2) *Model Fixed Effect*

Pendekatan model *fixed effect* mengasumsikan bahwa *intercept* dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu tetap. Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk mengungkap adanya perbedaan intercept antar individu.

3) *Model Random Effect*

Pendekatan yang dipakai dalam *random effect* mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan intercept yang mana intercept tersebut adalah variabel random. Menurut Doni Silalahi, Rachmad Sitepu dan Gim Tarigan (2014) metode ini mengestimasi data panel dengan menghitung error dari model regresi dengan metode *Generalized Least Square* (GLS). Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil populasi.

3.4.2 Pemilihan Model

Sebelum dilakukan uji asumsi klasik pada data panel yang diolah menggunakan software *Eviews 10* adalah menentukan model yang akan digunakan. Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dilakukan yakni:

1) Uji *Chow*

Chow test yaitu pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Common Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji *chow* ini sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect* lebih baik dibandingkan model *Fixed Effect*.

H_a : Model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan model *Common Effect*.

Dengan kriteria pengambilan keputusan:

- Terima H_0 bila $\rho\text{-value} > (\alpha = 0,05)$
- Tolak H_0 (Terima H_a) bila $\rho\text{-value} < (\alpha = 0,05)$

2) Uji *Hausman*

Hausman Test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Hipotesis dalam uji *chow* ini sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect* lebih baik dibandingkan model *Fixed Effect*.

H_a : Model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan model *Random Effect*.

Dengan kriteria pengambilan keputusan:

- Terima H_0 bila $\rho\text{-value} > (\alpha = 0,05)$
- Tolak H_0 (Terima H_a) bila $\rho\text{-value} < (\alpha = 0,05)$

3) Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Test ini digunakan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik daripada metode *Common Effect* (OLS). Uji *Lagrange Multiplier* (LM) didasarkan pada distribusi statistik Chi-Square dimana derajat kebebasan (*df*) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : maka digunakan model *common effect*

H_a : maka digunakan model *random effect*

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda atau data panel yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Tujuan dilakukan uji asumsi klasik adalah agar model regresi memenuhi asumsi dasar untuk menghasilkan estimasi yang *Best, Linear, Unbiased*, dan *Estimator* (BLUE). Dalam penelitian ini uji asumsi klasik model data panel meliputi pengujian normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

3.4.3.1 Uji Normalitas

Sebelum dilakukan uji hipotesis, harus dilakukan pengujian normalitas data terlebih dahulu. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Untuk

mengetahui adanya hubungan antara variabel atau tidak salah satu pengujiannya menggunakan metode *Jarque Bera Statistic (J-B)* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika $J-B \text{ Stat} > \chi^2$; artinya regresi tidak terdistribusi normal
- 2) Jika $J-B \text{ Stat} < \chi^2$; artinya regresi terdistribusi normal

3.4.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel penjelas (bebas) dari model regresi ganda (Setiawan dan Dwi Endah Kusri, 2010:82). Untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel atau tidak salah satu pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan tolerance dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Apabila Probabilitas > 10 , artinya terdapat hubungan erat antar variabel bebas.
- 2) Apabila Probabilitas < 10 , artinya tidak terdapat hubungan erat antar variabel bebas.

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika terjadi suatu keadaan dimana variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi, maka dikatakan model regresi tersebut terdapat suatu gejala heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi

disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah *error-learning* model. Masalah heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data yang bersifat *cross sectional*.

Pada model regresi, jika semua asumsi klasik dipenuhi kecuali heteroskedastisitas, maka pengira kuadrat terkecil tetap tak bias dan konsisten, tetapi tidak efisien (variansi membesar) yang akan berdampak pada statistik uji t menjadi tidak valid dan selang kepercayaan cenderung melebar untuk parameter regresi cenderung melebar (Setiawan dan Dwi Endah Kusri, 2010:107).

Untuk menguji heteroskedastisitas dapat digunakan Uji *White*. Pengujian ini dilakukan dengan cara meregresikan residual kuadrat dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Pengambilan keputusan dengan metode white dilakuka jika:

- 1) Probabilitas *chi squares* $> 0,05$, maka tidak menolak H_0 atau tidak ada heteroskedastisitas
- 2) Probabilitas *chi squares* $< 0,05$, maka tolak H_0 atau ada heteroskedastisitas.

3.4.3.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi dalam konsep regresi linear berarti komponen error berkorelasi berdasarkan urutan waktu (pada data berkala) atau urutan ruang (pada data tampang lintang, atau korelasi pada dirinya sendiri. Menurut Setiawan dan Dwi Endah Kusri (2010:139) penyebab terjadinya autokorelasi diantaranya: 1) Inersia, 2) Terjadinya bias dalam spesifikasi akibat adanya beberapa variabel penting yang tidak tercakup dalam model, 3) Terjadinya bias dalam spesifikasi akibat bentuk fungsi yang digunakan tidak tepat, 4) Fenomena sarang laba-laba, 5) Adanya model

otogresif, 6) Manipulasi data, dan 7) Transformasi data. Adapun uji autokorelasi yaitu uji DW (Durbin-Watson), prosedurnya yaitu:

- 1) Jika $DW < dL$ atau $DW > 4 - dL$ maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika DW terletak antara dU dan $(4 - dU)$, maka hipotesis H_0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4 - dU)$ dan $(4 - dL)$, maka tidak menghasilkan keputusan yang pasti.

3.4.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan (hipotesis) atau asumsi yang telah dibuat. Uji ini juga dilakukan untuk mengetahui bermakna atau tidaknya variabel atau model yang digunakan secara parsial atau simultan.

3.4.5.1 Uji secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi koefisien secara parsial dari variabel independensinya. Pengujian hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis Operasional

$H_0 : \beta_{YX_1} = \beta_{YX_2} = \beta_{YX_3} = 0$ *Wealth*, *Intergovernmental Revenue* dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

$H_0 : \beta_{YX_1} = \beta_{YX_2} = \beta_{YX_3} \neq 0$ *Wealth*, *Intergovernmental Revenue* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

2. Menentukan tingkat/taraf signifikansi atau derajat keyakinan, hipotesis ini diuji dengan menggunakan tingkat/signifikansi atau derajat keyakinan sebesar 5% (0,05).

3. Menentukan kriteria pengujian hipotesis.

Pengambilan keputusan dilakukan jika:

- a. Nilai prob. F-statistik < taraf signifikansi (0,05), maka tolak H_0 atau yang berarti bahwa variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat.
- b. Nilai prob. F-statistik > taraf signifikansi (0,05), maka tidak menolak H_0 atau yang berarti bahwa variabel bebas secara simultan tidak mempengaruhi variabel terikat.

3.4.5.2 Uji secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat bermakna atau tidak.

Pengujian hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis Operasional

$H_0 : \beta_{YX_1} = 0$ *Wealth* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

$H_a : \beta_{YX_1} \neq 0$	<i>Wealth</i> berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
$H_0 : \beta_{YX_2} = 0$	<i>Intergovernmental Revenue</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
$H_a : \beta_{YX_2} \neq 0$	<i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
$H_0 : \beta_{YX_3} = 0$	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
$H_a : \beta_{YX_3} \neq 0$	<i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

2. Menentukan tingkat/taraf signifikansi atau derajat keyakinan, hipotesis ini diuji dengan menggunakan tingkat/signifikansi atau derajat keyakinan sebesar 5% (0,05).
3. Menentukan kriteria pengujian hipotesis
Pengambilan keputusan dilakukan jika:
 - a. Nilai prob. t-statistik < taraf signifikansi (0,05), maka variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
 - b. Nilai prob. t-statistik > taraf signifikansi (0,05), maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi dapat menunjukkan seberapa besar variasi dari variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen. Sebuah model dikatakan baik jika nilai R^2 mendekati satu dan apabila nilai R^2 mendekati 0 maka model dikatakan kurang baik. Para ahli ekonometrika telah mengembangkan alternatif lain untuk R^2 yang disesuaikan (*adjusted R^2*) karena nilai koefisien determinasi R^2 selalu menaik ketika menambah variabel independen, sehingga untuk pengambilan keputusan koefisien determinasi untuk variabel independennya lebih dari satu disarankan menggunakan R^2 yang disesuaikan (*adjusted R^2*).

Analisis ini juga dapat dirumuskan menggunakan:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd : Koefisien determinasi

r^2 : koefisien korelasi dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika Kd mendekati nol, berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen rendah.
2. Jika Kd mendekati satu, berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.